

## Wali Kota Tangsel Tidak Hapus Pegawai Honorer

**TANGSEL (IM)**- Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menegaskan jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak akan menghapus Tenaga Kerja Sukarela (TKS) atau pegawai honorer.

"Saya selaku kepala daerah di Tangerang Selatan akan selalu saya usulkan ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Wali Kota Benyamin dalam keterangan resminya di Tangerang, Rabu (9/8).

Bahkan Wali Kota Benyamin menegaskan jika pihaknya telah menjamin status tenaga honorer melalui kebijakan alokasi anggaran melalui APBD.

"Saya sudah mengalokasikan anggaran di APBD 2024 untuk gaji, honorarium atau insentif bagi para tenaga kerja sukarela ini semangat untuk bekerja selama 13 bulan, karena sudah saya

siapkan juga untuk lebaran," katanya menambahkan.

Ia mengatakan pegawai yang kerja dengan disiplin dan mengikuti aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak akan ada pemecatan, apalagi untuk menghapus semua tenaga honorer yang ada di Tangerang Selatan.

"Kecuali mereka tidak disiplin, melanggar aturan, dan seterusnya," tegasnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada TKS tak perlu khawatir terhadap keberlangsungan bekerja, karena kebijakan Pemkot Tangsel menjamin itu semua.

"Oleh karenanya sekurang-juga sikap, jaga attitude, jaga akhlak, jaga adab, jaga disiplin, jaga loyalitas, jaga harmonisasi, jaga persatuan dan jaga kesatuan di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena saya tidak butuh pegawai yang aneh-aneh kerjanya," pungkash Benyamin Davnie. ● pp

## BPBD Lebak Minta Warga Waspada Kebakaran Hutan

**LEBAK (IM)**- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten meminta masyarakat setempat meningkatkan kewaspadaan kebakaran hutan selama fenomena El Nino antara Agustus - September.

"Peringatan kewaspadaan itu menyusul kawasan hutan Pasir Ona Rangkasbitung terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizki Pratama di Lebak, Rabu (9/8).

Menurut dia, kawasan hutan di Kabupaten Lebak terluas di wilayah Provinsi Banten baik hutan milik masyarakat, hutan adat, hutan produktif dan hutan kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

BPBD Lebak bahkan telah mengeluarkan peringatan dini bencana kebakaran kawasan hutan sehingga

bungan dampak El Nino.

Untuk itu, lanjut dia, masyarakat diharapkan tidak membuang puntung rokok sembarangan karena bisa menimbulkan percikan api dan berpotensi kebakaran.

Selain itu masyarakat yang membuka ladang untuk pertanian dan perkebunan dilarang membakar dengan menggunakan bahan bakar minyak.

Begitu pula petani Baduy yang saat ini membuka ladang di kawasan hutan tidak melakukan pembakaran limbah pepohonan dan rerumputan ilalang.

Mereka diperbolehkan melakukan pembakaran, namun diawasi agar api itu tidak meluas ke lokasi lain sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan.

"Kami minta masyarakat dapat mencegah terjadi kebakaran di kawasan hutan pada musim kemarau itu," pungkash Febby. ● pra



IDN/ANTARA

### MENHAN RESMIKAN BANTUAN SUMUR BOR DI GUNUNGKIDUL

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) menyapa warga saat peresmian bantuan sumur bor di Desa Wareng, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta, Rabu (9/8). Prabowo Subianto meresmikan bantuan pengabdian masyarakat Universitas Pertaian berupa sumur bor dan jaringan pipa di 10 titik di Kabupaten Gunungkidul dan satu di Kabupaten Bantul untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga.

### AGAR TAK TERTIPU SPK BODONG

## Plt Inspektur Provinsi Banten Minta Pengusaha Cerdas

Adanya pengusaha yang tertipu SPK bodong harusnya menjadi pembelajaran agar masyarakat atau pengusaha lebih cerdas agar dapat mengetahui proyek yang tertera dalam DIPA Pemprov Banten. Untuk itu, OPD harus lebih aktif mensosialisasikan proyek yang akan dikerjakan tahun ini, Plt Inspektur Provinsi Banten, Moch Tranggono.

**SERANG (IM)**- Baru-baru ini ada pengusaha yang tertipu Surat Perintah Kerja (SPK) palsu atau bodong dari salah satu OPD di Pemprov Banten. Pengusaha tersebut mengalami kerugian miliaran Rupiah.

Plt Inspektur Provinsi Banten, Moch Tranggono menegaskan, ada dua hal yang

harus diantisipasi. Pertama dari eksternal.

"Ada pembelajaran dari masyarakat. Zaman pandemi Covid-19, zamannya susah, susah mencari pekerjaan, jadi gampang tergour," ujar Tranggono usai kegiatan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B,

Rabu (9/8).

Kata dia, adanya pengusaha yang tertipu SPK bodong harusnya menjadi pembelajaran agar masyarakat atau pengusaha lebih cerdas agar dapat mengetahui proyek yang tertera dalam DIPA Pemprov Banten.

Untuk itu, OPD harus lebih aktif mensosialisasikan proyek yang akan dikerjakan tahun ini.

Selain itu, mantan Pj Sekda Banten ini juga mengatakan perlu adanya pencegahan dengan perbaikan tata kelola, sehingga bisa dilakukan penerapan manajemen risiko. Kata dia, SPK bodong masuk dalam tindak pidana korupsi dan indisipliner ASN.

### Pj Sekda Banten Siapkan Sanksi Tegas

Pj Sekda Banten, Virgojanti menyiapkan sanksi tegas apabila ada oknum ASN yang

berani memalsukan surat perintah kerja (SPK) alias membuat SPK bodong. Menurutnya hal itu menunjukkan sikap ASN yang tidak memiliki integritas.

Ia berharap, pemalsuan SPK bodong yang dilakukan oknum ASN tidak terjadi lagi di Pemprov Banten.

"Itu di luar kita dia berani mengatasnamakan lembaga institusinya. Padahal tidak pernah ada pengadaan barang dan jasa tersebut, itu benar-benar pribadi yang bersangkutan," ujar Virgo saat sosialisasi anti korupsi di lingkungan Pemprov Banten, Rabu (9/8).

Perempuan yang juga menjabat juga sebagai Kepala DPMPPTSP Provinsi Banten ini menegaskan, Pemprov Banten bakal menindak tegas ASN yang membandel, mulai dari sistem disiplin pegawai.

"Pak Gubernur menugaskan saya untuk melakukan

pembinaan kepada seluruh ASN termasuk semua pegawai yang ada di Pemprov Banten," ungkapnya.

Virgo mengaku perlu mengingatkan kedisiplinan dan integritas pegawai baik ASN maupun non ASN. Selain itu, Pemprov juga melakukan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi yang terus akan dilakukan secara masif.

Ia juga berpesan kepada para kepala OPD dapat mensosialisasikan kembali pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan OPD masing-masing.

"Kalau itu tidak dilakukan, nanti upaya kita untuk lebih masif lagi melakukan gerakan antikorupsi ini dapat terhambat, secara masif juga kepala OPD memiliki komitmen bersama dalam rangka mendorong jiwa integritas bagi ASN. Mudah-mudahan ini dapat terbentuk," tuturnya. ● pra

## Wujudkan Generasi Sehat, Bulan Imunisasi Anak Sekolah Dimulai

**TANGERANG (IM)**- Sebagai salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya anak-anak usia sekolah, Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan Kota Tangerang memulai kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tangerang, Dini Anggraeni, turut meninjau langsung Kick OFF BIAS Kota Tangerang yang berlangsung di SDN Total Persada Kelu-

rahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Rabu (9/8).

"Gimana sudah pada siap diimunisasi? Sudah sarapan belum ini adik-adik?," sapa wakil wali kota, kepada anak-anak yang sudah mengantar di ruang Imunisasi.

Kegiatan ini serentak diselenggarakan mulai 9 Agustus 2023 dengan menggendeng 39 Puskesmas se-Kota Tangerang, lanjut Sachrudin, dan diharapkan seluruh peserta didik bisa mendapatkan perlindungan kesehatan, salah satunya melalui imunisasi ini.

"Setiap anak usia sekolah harus dipastikan memiliki riwayat imunisasi rutin, lengkap, tidak hanya saat bayi saja. Dan melalui BIAS ini, kami harap bisa memenuhi imunisasi lanjutan pada anak-anak kita," tambahnya.

Sementara itu, Kadinkes, Dini Anggraeni menambahkan, gelaran imunisasi ini ditargetkan untuk kami lakukan imunisasi mulai dari sekolah, Puskesmas, Posyandu dan fasilitas kesehatan serta ruang publik di Kota Tangerang," pungkashnya. ● joh



IST

Wakil Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Tangerang, Dini Anggraeni, turut meninjau langsung Kick OFF BIAS Kota Tangerang yang berlangsung di SDN Total Persada Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Rabu (9/8).

### DUGAAN KORUPSI RSUD TIGARAKSA

## Kejari Kab. Tangerang Periksa Pemilik Lahan hingga BPN

**TANGERANG (IM)**- Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan pemeriksaan secara marathon dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Doni Saputra mengatakan, dalam sepekan ini, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak seperti pemilik lahan, panitia pengadaan lahan hingga pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Fokus penyidik saat ini masih mengumpulkan barang bukti. Jadi penyidik masih terus memeriksa dan meminta klarifikasi seperti pemilik lahan, panitia pengadaan lahan," ujar Doni, Rabu (9/8).

Menurut Doni, para pihak terkait tersebut diminta keterangan seputar asal usul lahan, kepemilikan lahan hingga proses jual beli lahan hingga keabsahan dokumen lahan seluas 4,9 hektar tersebut. "Tentang status dan dokumen lahan kami sudah meminta keterangan dari sejumlah pegawai BPN," kata Doni.

### Naik ke Tahap Penyidikan

Doni mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD ini telah naik ke penyidikan. Tahap penyidikan diambil karena penyidik melihat adanya indikasi pidana dalam proses pembebasan lahan RSUD Tigaraksa yang menghabiskan dana APBD Kabupaten Tangerang sebesar Rp 55 miliar itu.

"Diproses penyidikan inilah penyidik harus benar-benar fokus untuk mencari alat bukti sehingga bisa berujung pada kesimpulan akhir," kata Doni. Meski status sudah masuk

tahap penyidikan belum ada penetapan calon tersangka. "Penyidik masih fokus mencari minimal dua alat bukti yang kuat untuk membuat kasus ini lebih terang," ujarnya.

Sampai saat ini, penyidik masih melakukan pemanggilan dan pemeriksaan pihak terkait seperti pejabat di Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemukiman Kabupaten Tangerang yang bertanggung jawab terhadap proses pembebasan lahan seluas 4,9 hektar tersebut. "Penyidik juga memeriksa pejabat di BPN," kata Doni.

Meski tidak menyebutkan jumlah dan siapa saja yang diperiksa, Doni menegaskan, para terduga itu diminta keterangan asal usul tanah RSUD, proses pengadaan hingga pembebasan lahan tersebut. "Dari keterangan mereka kami mengumpulkan alat bukti," kata Doni.

Doni mengatakan, indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa Kabupaten Tangerang ini terendus karena laporan masyarakat ke Kejaksaan. "Laporan itu lalu kami tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanah seluas 4,9 hektar yang berada di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang itu dibeli panitia pembebasan lahan dari beberapa pemilik lahan dengan harga Rp 700 ribu per meter. Padahal, pembebasan lahannya bernilai Rp 1 juta per meter. Soal informasi ini, Doni mengatakan, hal tersebut menjadi materi pemeriksaan tim penyidik. ● pp

IDN/ANTARA



### KIRAB 1.000 TUMPENG DI LERENG GUNUNG MERBABU

Warga menata tumpengan hasil bumi pada kirab 1.000 tumpeng di Lereng Gunung Merbabu, Selo, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (9/8). Kirab 1.000 tumpeng yang dilakukan masyarakat Desa Selo itu sebagai rasa syukur untuk menandai peringatan 100 tahun atau satu abad usia Desa Selo sekaligus menyambut HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia.

## Dinas Pertanian Banten Pinjamkan Pompa untuk Bantu Petani Aliri Sawah

**SERANG (IM)**- Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino," katanya.

"Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah," kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M Tauhid di Serang, Rabu (9/8).

Ia menyampaikan bahwa layanan pinjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.

Sebelum layanan pinjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.

"Semoga hal tersebut dapat membantu para petani," katanya menambahkan.

Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saiful Bahri Maemun men-

gatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.

"Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino," katanya.

Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.

"Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing," katanya.

Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus luasnya mencapai 639 hektare. Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan. ● pra